



RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TA 2024**



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

JL. HI. MUCHTAR KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA

LAMPUNG TENGAH, KEC. GUNUNG SUGIH, 34161

LAMAN : <https://dlh.lampungtenghkab.go.id/>

POS-EL : dinas_lh@lampungtenghkab.com

2023



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Hi. Muchtar, Komplek Perkantoran Dinas Telp. (0725) 529818, 529767
Pos-el :dinas_lh@lampungtengahkab.go.id
Gunung Sugih, Lampung Tengah

Kode Pos : 34165

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 660/078/KPTS/D.a.VI.11/SEKT/2023**

**TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2024**

KEPALA DINAS

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026, dan Rencana Strategis DLH Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipasif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup yang disusun setiap tahun;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah wajib membuat Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup TA 2024;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada

- Masyarakat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2022;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024
- KESATU** : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran

- sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renja DLH merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026.
- KETIGA** : Renja DLH Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DLH Tahun 2024
- KEEMPAT** : Sistematika penulisan Rencana Kerja DLH Tahun 2024 meliputi:
- a. Bab I. PENDAHULUAN
 - b. Bab II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022
 - Bab III. TUJUAN DAN SASARAN DLH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 - c. Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DLH LAMPUNG TENGAH TA 2024
 - d. Bab V PENUTUP
- KELIMA** : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 3 Agustus 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



RONY WITONO, S.T., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730815 199803 1 007

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Bupati Lampung Tengah
- 2. Arsip

KATA PENGANTAR

Atas berkah dan hidayah Allah SWT serta didorong oleh semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas pembangunan di bidang lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024. Renja ini adalah merupakan salah satu bagian dari substansi Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Penyusunan Renja ini tidak terlepas dari dokumen induk perencanaan yang sudah ada baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah, 2021-2026 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026. Renja ini memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai perangkat daerah pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Telah menjadi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Semoga Dinas Lingkungan Hidup dapat melaksanakan mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Bandar Lampung, 3 Agustus 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lampung Tengah



RONY WITONO, S.T., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730815 199803 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi..... iii

Daftar Tabel v

Daftar Gambar vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DLH Tahun 2022 Dan Capaian

Renstra DLH Kabupaten Lampung Tengah..... 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DLH Lampung Tengah..... 13

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

DLH Lampung Tengah..... 17

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

DLH Lampung Tengah..... 20

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 26

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DLH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 27

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dlh Lampung Tengah 28

3.3 Program Dan Kegiatan..... 31

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DLH LAMPUNG TENGAH TA 2024 38

BAB V PENUTUP 51

Daftar Pustaka 52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
DLH Lampung Tengah Dan Pencapaian Renstra DLH
Lampung Tengah S/D Tahun 20229

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Kabupaten
Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah16

Tabel 2.3.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
DLH Tahun 2022 Kabupaten Lampung Tengah.....21

Tabel 3.1 Tujuan Strategis Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lampung Tengah29

Tabel 3.2 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lampung Tengah30

Tabel 3.3 Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lampung Tengah30

Tabel 4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Tahun 202447

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasirancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan untuk kegiatan DLH Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024. Dokumen tersebut memuat perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Lingkungan Hidup yang berdasarkan pada Rencana Strategis DLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 memberikan arahan bagi aparatur untuk secara bersama-sama melaksanakan dan mengoptimalkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang Lingkungan Hidup Kabupaten

Lampung Tengah pada tahun 2024. Dengan demikian Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dapat terwujud secara optimal dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara professional.

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan dan tetap memperhatikan keragaman sosial serta budaya daerah setempat.

Penyusunan Renja DLH Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan seperti koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2024 melalui tahapan – tahapan sebagai berikut :

- 1. Persiapan penyusunan
- 2. Penyusunan rancangan
- 3. Penyusunan rancangan
- 4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- 5. Perumusan rancangan akhir
- 6. Penetapan

Penyusunan Renja ini tidak terlepas dari dokumen induk perencanaan yang sudah ada baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah 2005-2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026

B. LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia NOMOR P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Tahun 2021 – 2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 – 2025
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
13. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

- Maksud :
 - a. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah ditahun 2024
 - b. Memberikan arah pembangunan di bidang Lingkungan Hidup ditahun 2024
 - c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan untuk tahun anggaran 2024;
 - d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.
- Tujuan :
 - a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024;
 - b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Strategis DLH Kabupaten Lampung Tengah di Tahun 2024;
 - c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024.

D. SISTEMATIKA TULISAN

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja DLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut

BAB SATU PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Sistematika Tulisan

BAB DUA HASIL EVALUASI RENJA DLH TAHUN 2021

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja DLH TAHUN 2022 Dan Capaian Renstra DLH

- B. Analisis Kinerja Pelayanan DLH Lampung Tengah
- C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi DLH Lampung Tengah
- D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi

**BAB TIGA TUJUAN DAN SASARAN DLH
LAMPUNG TENGAH**

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan Dan Sasaran Renja DLH Lampung Tengah
- C. Program Dan Kegiatan

**BAB EMPAT RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DLH LAMPUNG TENGAH**

- A. Rencana Kerja DLH Lampung Tengah 2024

BAB LIMA PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DLH TAHUN 2022

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA DLH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas LH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 didapat dari realisasi hasil kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD DLH Kabupaten Lampung Tengah. Pada Tahun 2022 masih terjadi Pandemi Wabah Covid-19 yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kinerja.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 2021-2026, Tujuan strategis Dinas Lingkungan Hidup adalah :

“MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP”

Dan indikator kinerja utama dari tujuan DLH Kabupaten Lampung Tengah adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin). Target dari tujuan DLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 yaitu meningkatkan indeks kualitas Lingkungan Hidup berada pada angka 62,41 poin. Dan Realisasi target di Tahun 2022 yaitu sebesar 57,63. Hasil tersebut tidak mencapai target karena pencapaiannya hanya sebesar 92,34 % (*data terlampir pada tabel 2.2*)

Program yang dilaksanakan oleh DLH Lampung Tengah pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

- 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
- 8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- 10. Program Pengelolaan Persampahan
- 11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Hasil review target dan realisasi kinerja program dan kegiatan DLH Kabupaten Lampung Tengah tersebut tercantum pada Tabel 2.1

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DLH LAMPUNG TENGAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DLH LAMPUNG TENGAH S/D TAHUN 2023
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH LT) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja DLH LT tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja DLH LT tahun (2022)	Realisasi Renja DLH LT tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=7 / 6	9	10=5+7+9	11=10/4
									K	K	K	K	%	K	K	%
2							Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	11						Bidang Urusan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,58	60,47	62,41	57,63	92,34%	63,00	57,63	91,41%
2	11	01					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	96,56	100,00	100,00	100,00%	100,00	100	100%
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100	100%
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100	100%
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam	85	96,15	85,00	85,00	100,00%	85,00	100	100%

								kondisi baik								
2	11	01	2	01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	62	62,00	62	62	100,00%	64	62	100%
2	11	01	2	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	20	4,00	4	4	100,00%	4	12	60,00%
2	11	01	2	01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Dokumen Kinerja OPD	8	0,00	2	2	0,00%	2	4	50,00%
2	11	01	2	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan OPD(%)	100	98,76	84	100	100,00%	84	283	100,00%
2	11	01	2	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan fasilitasi pengajuan gaji dan tunjangan ASN	190	41,00	43	44	102,33%	41	126	66,32%
2	11	01	2	02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan fasilitasi pengajuan Honor Administrasi ASN dan Gaji Non ASN	836	167,00	166	165	99,40%	166	498	59,57%
2	11	01	2	02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Tahunan yang disusun tepat waktu	4	4,00	0	0	0,00%	0	4	100,00%
2	11	01	2	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pendidikan danPelatihan Formal yang diikuti (jenis)	10	2,00	2	1	50,00%	1	4	40%
2	11	01	2	05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi	10	2,00	2	2	100,00%	1	5	50,00%
2	11	01	2	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan administrasi umum (%)	85	82,92	81	97,74	100,00%	81	100	117,65%
2	11	01	2	06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	50	10,00	7	7	100,00%	10	27	54,00%
2	11	01	2	06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	248	48,00	46	50	108,70%	50	148	59,68%
2	11	01	2	06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	90	18,00	18	18	100,00%	18	54	60,00%

2	11	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan kebutuhan bahan logistik kantor (jenis)	15	2,00	3	3	100%	3	8	53,33%
2	11	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	55	11,00	11	11	100%	11	33	60,00%
2	11	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	162	30,00	30	30	100%	38	98	60,49%
2	11	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum untuk Peserta Rapat/Tamu	1800	353,13	360	360	100%	12	725	40,28%
2	11	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam/luar daerah dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi, konsultasi, operasional, pengawasan, pembinaan dan evaluasi	500	264,00	100	100	100%	100	464	92,80%
2	11	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Total Pengadaan (unit)	79	11,00	8	8	100%	20	39	49,37%
2	11	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah kebutuhan meubelair yang disediakan	33	5,00	1	1	100%	10	16	48,48%
2	11	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kebutuhan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	46	6,00	7	7	100%	10	23	50,00%
2	11	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa yang dipenuhi	15	3	3	3	100%	3	9	60%
2	11	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon, Internet, Listrik setiap bulan (termasuk BBM untuk genset)	60	12,00	12	12	100%	12	36	60,00%
2	11	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layakfungsi(%)	85	96,00	65	1	100%	65	100	100,00%
2	11	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang mendapat pemeliharaan	93	45,00	12	11	92%	12	68	73,12%
2	11	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat	36	6,00	6	6	100%	10	22	61,11%

RENJA 2024

2	11	03	2	02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten(Kegiatan)	5	1,00	1	1	100%	1	3	60,00%
2	11	03	2	02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi	375	65,00	65	75	100%	70	210	56,00%
2	11	03	2	03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan	1	0,00	0	0	-	0	0	0%
2	11	03	2	03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Alat Monitor Kualitas Air Online DAS Seputih (unit) dan Biaya Pemeliharaan Alat (unit/tahun)	1	0,00	0	0	-	0	0	0%
2	11	04				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH yang Terpelihara	89	90,91	78	91	100%	78	100	100,00%
2	11	04	2	01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Keanekaragaman Hayati/RTH/Hutan Kota yang terpelihara	108	20,00	21	22	100%	21	63	58,33%
2	11	04	2	01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Kehati Lampung Tengah	4	0,00	1	1	100%	1	2	50,00%
2	11	04	2	01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah pemeliharaan RTH	110	22,00	22	22	100%	22	66	60,00%
2	11	05				Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	(Total Perusahaan yang memiliki Perizinan B3/ Total Perusahaan) x 100%	100	97,00	20	100	100%	20	217	100,00%
2	11	05	2	01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Dokumen	5	1,00	1	1	100%	1	3	60,00%
2	11	05	2	01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terlaksananya verifikasi lapangan untuk TPS B3	175	35,00	30	50	100%	30	115	65,71%
2	11	06				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Total usaha yang taat terhadap izin lingkungan dengan total usaha yang dibina dan diawasi	100	100,00	60	100	100%	60	100	100,00%
2	11	06	2	01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan	Jumlah pelaku usaha atau kegiatan yang	175	35,00	30	50	100%	30	115	65,71%

							<i>yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>memenuhi ketaatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan</i>								
2	11	06	2	01	01		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi Izin Lingkungan dan/atau Rekomendasi Izin PPLH yang diterbitkan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)	10	2,00	2	1	50%	2	5	50,00%
2	11	06	2	01	02		Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLH yang mengikuti Kegiatan Pengembangan Kapasitas	10	0	2	1	50%	2	3	30,00%
2	11	06	2	01	03		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	225	35	50	50	100%	50	135	60,00%
2	11	07					PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah Dokumen MHA	4	0,00	1	1	100%	1	2	50,00%
2	11	07	2	01			<i>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</i>	<i>Jumlah Kegiatan</i>	4	0,00	1	1	100%	1	2	50,00%
2	11	07	2	01	01		Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Kelompok	4	0,00	1	1	100%	1	2	50,00%
2	11	08					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100	100,00	100	100	100%	2	100	100,00%
2	11	08	2	01			<i>Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>	<i>Jumlah Kegiatan</i>	14	1,00	2	5	250%	2	8	57,14%
2	11	08	2	01	03		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Peserta	500	50,00	400	400	100%	100	550	110,00%
2	11	09					Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Nominasi penerima penghargaan LH Lampung Tengah	10	1,00	2	2	100%	2	5	50,00%

								yang didaftarkan ke tingkat provinsi atau nasional									
2	11	09	2	01				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Penghargaan LH	15	2,00	2	3	150%	2	7	46,67%
2	11	09	2	01	01			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian dan Pemberian Penghargaan PPLH	54	6,00	9	9	100%	6	21	38,89%
2	11	10						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Total Pengaduan yang ditangani dengan Total Pengaduan yang masuk	50	100,00	50	100	100%	50	100	100,00%
2	11	10	2	01				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan yang dapat diselesaikan	10	4,00	1	3	300%	1	8	80,00%
2	11	10	2	01	01			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan LH dari Masyarakat	12	4,00	2	3	150%	2	9	75,00%
2	11	11						Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani oleh daerah	35	15,31	31	15,79	51%	32	63	100,00%
2	11	11	2	01				Pengelolaan Sampah	Volume pengurangan Sampah(ton)	26300	3950,00	5100	2609	51%	5100	11659	44,33%
2	11	11	2	01	03			Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Volume Sampah yang diangkut dan ditangani dengan cara 5P (ton)	80000	25500,00	16000	25550	160%	16000	67050	83,81%
2	11	11	2	01	05			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Operasional Pengelolaan Persampahan (unit)	78	8,00	13	11	85%	10	29	37,18%
2	11	11	2	01	05			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (unit)	5	0	1	1	100%	1	2	40,00%

Sumber : Laporan evaluasi terhadap hasil Renja DLH Lampung Tengah Tahun 2022

Dari Tabel tersebut dapat jabarkan

- 1) Realisasi Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sbb :

Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini memiliki indikator yaitu Persentase titik sampling Kualitas air sampling yang memenuhi standar baku mutu dengan target capaian sebesar 72 % dan realisasi capaian pada tahun 2022 sebesar 50%, Ketidakcapaian dikarenakan oleh faktor pendukung/ penghambat antara lain

- Jumlah sampel uji air sungai yang sangat minim
- Aktifitas Perusahaan di Lampung Tengah telah kembali normal setelah era pandemi covid 19
- Daerah aliran sungai sudah mulai menerima beban pencemaran lingkungan yang bersumber dari pembuangan limbah cair dari seluruh IPAL perusahaan di Lampung Tengah

- 2) Realisasi Program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

• **Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

Program ini memiliki indikator Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup dengan target capaian sebesar 2 dokumen dan realisasi capaian pada tahun 2022 sebesar 2 dokumen Ketercapaian/Ketidakcapaian dikarenakan oleh faktor pendukung/ penghambat antara lain ketersediaan data teknis, peralatan komputer dan jaringan internet yang memadai

• **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**

Program ini memiliki indikator Persentase RTH yang Terpelihara dengan target

capaian sebesar 78% dan realisasi capaian pada tahun 2022 sebesar 91 %

Ketercapaian/Ketidakcapaian dikarenakan oleh faktor pendukung/penghambat antara lain keterbatasan anggaran / dana dan sarana prasarana tidak memadai

- **Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**

Program ini memiliki indikator Persentase Total Perusahaan yang memiliki Perizinan B3 dengan Total Perusahaan yang diverifikasi" dengan target capaian sebesar 20 % dan realisasi capaian pada tahun 2022 sebesar 100 % Ketercapaian dikarenakan oleh faktor pendukung antara lain Di Lampung Tengah, Perusahaan sudah mempunyai tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 sesuai aturan yang berlaku.

- **Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Program ini memiliki indikator Persentase Total usaha yang taat terhadap izin lingkungan dengan total usaha yang dibina dan diawasi dengan target capaian sebesar 60 % dan realisasi capaian pada tahun 2022 sebesar 100 %

Ketercapaian program ini dikarenakan oleh faktor pendukung antara lain Faktor Pendukung:

- Terjalin komunikasi yang baik antara dinas lingkungan hidup dengan para pelaku usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya dikeluarkan oleh Pemkab Lampung Tengah.

- **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Program ini memiliki indikator "Cakupan peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat dengan target capaian sebesar 100% dan realisasi capaian pada tahun 2022 sebesar 100%

Ketercapaian program ini dikarenakan oleh faktor pendukung antara lain :

- mempunyai narasumber dari DLH sendiri
- masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan pelatihan

- **Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH**

Program ini memiliki indikator Jumlah Dokumen MHA dengan target capaian sebesar 1(satu) dokumen dan realisasi capaian pada tahun 2022 sebesar 1(satu) dokumen. Ketercapaian program ini dikarenakan oleh faktor pendukung antara lain koordinasi dgn pihak masyarakat adat sangat mudah dan masyarakat antusias dalam menerima pembinaan dari dinas

- **Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Program ini memiliki indikator Jumlah Nominasi penerima penghargaan LH Lampung Tengah yang didaftarkan ke tingkat provinsi atau nasional dengan target capaian sebesar 2 orang dan realisasi capaian pada tahun 2022 sebesar 2 orang. Ketercapaian/Ketidakcapaian dikarenakan oleh faktor pendukung/penghambat antara lain :

- Pengajuan Nominasi peraih kalpataru dan adiwiyata harus tepat waktu sesuai petunjuk teknis panitia tingkat provinsi dan pusat.
- Terbatasnya calon penerima penghargaan yang sesuai dgn kategori.

- **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Program ini memiliki indikator Persentase Total Pengaduan yang ditangani dengan Total Pengaduan yang masuk dengan target capaian sebesar 50% dan

realisasi capaian pada tahun 2022 sebesar 100 %.

Ketercapaian/Ketidakcapaian dikarenakan oleh faktor pendukung/ penghambat antara lain :

Faktor Penghambat:

- Kurangnya tenaga/personil pengawas lingkungan hidup
- Sarana dan prasarana mobilitas yang kurang memadai
- Identitas pengadu tidak jelas dan tidak lengkap

Faktor Pendukung:

- Terjalin komunikasi yang baik antara dinas lingkungan hidup dengan para pelaku usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya dikeluarkan oleh Pemkab Lam-teng
- Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dapat diselesaikan dengan sesuai dengan aturan yang berlaku, persuasif dan kekeluargaan.

• **Program Pengelolaan Persampahan**

Program ini memiliki indikator sbb :

- 1) Rasio Volume Sampah yang diolah/Volume timbunan sampah" dengan target capaian sebesar 31 persen dan realisasi capaian pada tahun 2022 sebesar 17,41%
- 2) Persentase jumlah sampah yang tertangani oleh daerah dengan target capaian sebesar 31 persen dan realisasi capaian pada tahun 2022 sebesar 15,79%

Ketercapaian/Ketidakcapaian dikarenakan oleh faktor pendukung/ penghambat antara lain ;

- Ketersediaan jumlah dan kondisi alat angkut yang kurang memadai dalam penanganan sampah di perkotaan.
- Ketersediaan lahan TPS dan/atau TPS3R yang belum memenuhi rasio jumlah penduduk.

• **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini memiliki indikator

1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan target capaian sebesar 100 % dan realisasi capaian pada tahun 2022 sebesar 100%
2. Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan target capaian sebesar 100 % dan realisasi capaian pada tahun 2022 sebesar 100%
3. Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin dengan target capaian sebesar 100 % dan realisasi capaian pada tahun 2022 sebesar 100%
4. Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik dengan target capaian sebesar 100 % dan realisasi capaian pada tahun 2022 sebesar 100 %

Ketercapaian dikarenakan oleh faktor pendukung antara lain

- Ketersediaan data teknis
 - Pelaksanaan administrasi yang optimal
 - Kedisiplinan asn yang tinggi
 - Pemeliharaan peralatan kantor telah maksimal
- 3) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- Pandemi Global Wabah Covid-19 di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Terjadi Recofusing Anggaran TA 2022 sehingga mengurangi pagu anggaran dan volume pekerjaan.
 - Fluktuasi harga barang-barang yang tersedia dipasar bila dibandingkan harga standar yang telah ditetapkan.
 - Selisih antara HPS dan Kontrak Pengadaan dikarenakan ada penawaran dari pihak ketiga terhadap suatu pengadaan barang atau jasa
 - Adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai peraturan barang dan jasa yang berlaku

- Biaya Perjalanan Dinas harus menyesuaikan dengan ongkos real untuk penginapan dan jasa transportasi yang digunakan pada saat melakukan perjalanan dinas.
 - Beberapa perjalanan dinas ke luar daerah dipangkas/dikurangi waktunya atau tidak mendapatkan izin dari Sekretaris Pemkab Lampung Tengah
- 4) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini memiliki indikator yaitu Persentase titik sampling Kualitas air sampling yang memenuhi standar baku mutu dengan target capaian sebesar 72 % dan realisasi capaian pada tahun 2022 sebesar 50%. Ketidakberhasilan program ini terjadi di kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota pada sub kegiatan 3.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut. Ketidakcapaian tersebut dikarenakan oleh faktor pendukung/ penghambat antara lain :

- Jumlah sampel uji air sungai yang sangat minim
 - Aktifitas Perusahaan di Lampung Tengah telah kembali normal setelah era pandemi covid 19
 - Daerah aliran sungai sudah mulai menerima beban pencemaran lingkungan yang bersumber dari pembuangan limbah cair dari seluruh IPAL perusahaan di Lampung Tengah
- 5) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Pembiayaan kegiatan harus mengacu pada satuan standar harga yang terbaru.

- Pengadaan Barang dan Jasa harus mengikuti metode pengadaan barang dan jasa yang berlaku
- Peryaratan teknis untuk mendukung sebuah kegiatan harus dapat dipenuhi
- Setiap program/kegiatan/sub kegiatan harus direncanakan dengan terukur dan detail sehingga proses pelaksanaannya tidak mengalami kendala dan hambatan. Dari perencanaan anggaran, penetapan target dan realisasi dan metode pengadaannya.

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DLH LAMPUNG TENGAH

Berikut ini adalah kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DLH Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji telah sesuai dengan tugas dan fungsi DLH, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Indikator Kinerja Utama pada DLH Kabupaten Lampung Tengah adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Persentase Penanganan Sampah. IKLH sendiri yang terdiri

- Indeks Kualitas Air (IKA)
- Indeks Kualitas Udara (IKU)
- Indeks Tutupan Lahan Hutan (ITH)

Sesuai dengan Renstra DLH Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 target indikator kinerja dan Realisasi dari Tujuan dan Sasaran Strategis DLH Lampung Tengah Tahun 2021 adalah sebagai berikut

- Target Tujuan DLH yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab. Lampung Tengah

Tahun 2022 sebesar 62,41 dan Realisasi Target didapatkan 57,63

- Target Sasaran Strategis DLH Lampung Tengah pada Indeks Kualitas Air (IKA) Kab. Lampung Tengah Tahun 2022 sebesar 58,44 dan Realisasi Target didapatkan 50
- Target Sasaran Strategis DLH Lampung Tengah pada Indeks Kualitas Udara (IKU) Kab. Lampung Tengah Tahun 2022 sebesar 84,08 dan Realisasi Target didapatkan 82,55
- Target Sasaran Strategis DLH Lampung Tengah pada Indeks Tutupan Lahan Hutan (ITH) Kab. Lampung Tengah Tahun 2022 sebesar 29,17 dan Realisasi Target didapatkan 24,64
- Target Sasaran Strategis DLH Lampung Tengah pada Persentase Penanganan Sampah Kab. Lampung Tengah Tahun 2022 sebesar 21% dan Realisasi Target didapatkan 15,79 %

Hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah tercantum pada Tabel 2.2 berikut ini

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NO	Indikator	IKK Kementerian LHK 2022	IKK DLH Prov. Lampung 2022	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Indeks Kualitas LH	72,42	69,1	52	61,83	62,41	63	60,47	57,63	63	65	
	a. Indeks Kualitas Air	55,3	54,72	55	58,34	58,44	58,54	56,67	50	59	60	
	b. Indeks Kualitas Udara	88,05	87,32	77,5	83,98	84,08	84,18	83,46	82,55	85	87	
	c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	63,5	34,29	30	26,86	29,17	31,47	24,48	24,64	32	34	
2	Persentase penanganan sampah	49,73%	n/a	30	20%	21%	22%	14,79%	15,79%	16,70%	17,70%	

Sumber : Lakip KLHK Tahun 2021 dan Lakip DLH Lampung Tengah Tahun 2021

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DLH LAMPUNG TENGAH

Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lampung Tengah yaitu melaksanakan sebagian kewenangan daerah Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut DLH Lampung Tengah mempunyai fungsi sbb:

- 1) Perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan. Permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ini antara lain :
 - Terbitnya Peraturan tentang mengatur pengelolaan LH yang baru yaitu Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta aturan turunannya
- 2) Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan dan pengelolaan sampah. Permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ini antara lain :
 - Lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam kerangka sinkronisasi implementasi program pembangunan yang bersifat lintas sektoral.
- 3) Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan pengendalian dampak lingkungan Permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ini antara lain :
 - Keterbatasan alokasi anggaran urusan wajib bidang lingkungan hidup
 - Kurangnya kordinasi dan partisipasi masyarakat, pelaku usaha dan stakeholder lainnya dalam upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dan rehabilitasi lingkungan hidup yang telah mengalami pencemaran dan kerusakan.

- 4) Pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan.

Permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ini antara lain :

- Kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur di DLH Lampung Tengah yang mempunyai latar belakang pendidikan teknis untuk melakukan pembinaan ke masyarakat

- 5) Pembinaan dan pengendalian teknis analisis mengenai dampak lingkungan.

Permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ini antara lain :

- Kurangnya kuantitas aparatur di DLH Lampung Tengah yang mempunyai sertifikat dasar amdal dan penilai amdal

- 6) Pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan.

Permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ini antara lain :

- Masyarakat dan pelaku usaha masih mengabaikan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan LH

- 7) Pengawasan pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan sampah. Permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ini antara lain :

- UPTD Pengelolaan Sampah baru melayani 2 kecamatan dari 28 kecamatan di seluruh di Lampung Tengah
- Keterbatasan jumlah sarana dan prasarana
- Keterbatasan lahan untuk membuka TPA dan TPS baru

- Sampah di TPA kurang mendapatkan perlakuan khusus atau tidak ada pemilahan dan pengolahan sampah dalam volume besar
- Masih sedikitnya pusat pengolahan sampah seperti bank sampah, rumah kompos dan pusat daur ulang di Lampung Tengah baik dari pemerintah atau swadaya masyarakat
- Masyarakat dan pelaku usaha masih mengabaikan pola hidup bersih dan sehat

D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal RKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021, sebagian besar telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup proses Penyusunan rancangan awal telah mengikuti mekanisme partisipatif.

Hasil analisis kebutuhan Tahun 2021 adalah :

1. Jumlah program/kegiatan/sub kegiatan yang ada RKPD Tahun 2021 sama dengan Program dan Kegiatan yang ada dalam renja Tahun 2021
2. Seluruh program/kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam Renja Tahun 2021 sesuai dengan program yang ada dalam RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026.
3. Ada beberapa program/kegiatan/sub kegiatan pada TA 2021 yang mendapatkan penambahan/pengurangan anggaran pada APBD TA 2021.
4. Ada beberapa anggaran sub kegiatan yang yang dikurangi pada APBD Perubahan TA 2021

Review terhadap rancangan RKPD selengkapnya dapat dilihat pada Tabel. 2.3. Terlampir

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD DLH TAHUN 2022
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif					Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				7.827.162.070	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				6.849.832.070	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung Tengah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	4	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung Tengah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	4	15.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lampung Tengah	Jumlah laporan keuangan Tahunan yang disusun tepat waktu	2	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lampung Tengah	Jumlah laporan keuangan Tahunan yang disusun tepat waktu	4	15.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.241.652.070	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.061.172.070	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Tengah	Jumlah Laporan fasilitasi pengajuan gaji dan tunjangan ASN	41	3.723.788.070	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Tengah	Jumlah Laporan fasilitasi pengajuan gaji dan tunjangan ASN	41	3.543.788.070	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Tengah	Jumlah Laporan fasilitasi pengajuan Honor Administrasi ASN dan Gaji Non ASN	160	2.517.864.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Tengah	Jumlah Laporan fasilitasi pengajuan Honor Administrasi ASN dan Gaji Non ASN	167	2.517.384.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Lampung Tengah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi	2	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Lampung Tengah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi	2	10.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				246.900.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				277.530.000	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lampung Tengah	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lampung Tengah	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	3.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lampung Tengah	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	48	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lampung Tengah	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	48	50.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lampung Tengah	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	18	5.400.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lampung Tengah	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	18	5.400.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lampung Tengah	Jumlah Item Logistik Kantor	3	15.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lampung Tengah	Jumlah Item Logistik Kantor	3	15.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lampung Tengah	Jumlah barang cetak yang disediakan	11	12.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lampung Tengah	Jumlah barang cetak yang disediakan	11	13.030.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lampung Tengah	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	30	30.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lampung Tengah	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	30	30.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lampung Tengah	Tersedianya makan dan minum untuk Peserta Rapat/Tamu	360	17.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lampung Tengah	Tersedianya makan dan minum untuk Peserta Rapat/Tamu	360	17.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung Tengah	Jumlah perjalanan dinas dalam/luar daerah dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi, konsultasi, operasional, pengawasan, pembinaan dan evaluasi	100	114.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung Tengah	Jumlah perjalanan dinas dalam/luar daerah dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi, konsultasi, operasional, pengawasan, pembinaan dan evaluasi	100	144.100.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				52.750.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				52.700.000	
	Pengadaan Mebel	Lampung Tengah	Jumlah kebutuhan meubelair yang disediakan	10	16.750.000	Pengadaan Mebel	Lampung Tengah	Jumlah kebutuhan meubelair yang disediakan	5	16.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lampung Tengah	Jumlah kebutuhan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6	36.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lampung Tengah	Jumlah kebutuhan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6	36.700.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				56.160.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				56.160.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lampung Tengah	Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon, Internet, Listrik setiap bulan (termasuk BBM untuk genset)	12	56.160.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lampung Tengah	Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon, Internet, Listrik setiap bulan (termasuk BBM untuk genset)	12	56.160.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.189.700.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				362.270.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lampung Tengah	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang mendapat pemeliharaan	45	1.150.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lampung Tengah	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang mendapat pemeliharaan	12	322.670.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lampung Tengah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	6	14.600.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lampung Tengah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	6	14.600.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lampung Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi	1	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lampung Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi	1	25.000.000	
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				25.000.000	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				90.000.000	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				25.000.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				90.000.000	
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Lampung Tengah	Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan RPPLH yang disusun	1	25.000.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Lampung Tengah	Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan RPPLH yang disusun	2	90.000.000	
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup				1.552.500.000	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup				2.063.900.450	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				1.540.000.000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				2.051.400.450	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Lampung Tengah	Jumlah Titik Pantau DAS (titik)	8	1.370.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Lampung Tengah	Jumlah Titik Pantau DAS (titik)	8	1.431.100.700	

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Lampung Tengah	Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara ambien (titik)	6	30.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Lampung Tengah	Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara ambien (titik)	10	30.000.000	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Lampung Tengah	Jumlah uji sample kualitas air Limbah atau Sungai yang dapat dianalisis (uji)	25	140.000.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Lampung Tengah	Jumlah uji sample kualitas air Limbah atau Sungai yang dapat dianalisis (uji)	25	590.299.750	
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			1	12.500.000	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			1	12.500.000	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Lampung Tengah	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi	65	12.500.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Lampung Tengah	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi	75	12.500.000	
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				563.000.000	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				539.720.000	
	(KEHATI)					(KEHATI)					
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				563.000.000	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				539.720.000	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen	1	63.000.000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen	1	48.000.000	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lampung Tengah	Jumlah pemeliharaan RTH	22	500.000.000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lampung Tengah	Jumlah pemeliharaan RTH	22	491.720.000	
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)				26.000.000	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)				76.000.000	
	Penyimpanan Sementara Limbah B3				26.000.000	Penyimpanan Sementara Limbah B3				76.000.000	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Lampung Tengah	Terlaksananya verifikasi lapangan untuk TPS B3	25	26.000.000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Lampung Tengah	Terlaksananya verifikasi lapangan untuk TPS B3	30	76.000.000	
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin				42.500.000	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin				123.500.000	

	Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				42.500.000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				123.500.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Lampung Tengah	Jumlah Rekomendasi Izin Lingkungan dan/atau Rekomendasi Izin PPLH yang diterbitkan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)	2	12.500.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Lampung Tengah	Jumlah Rekomendasi Izin Lingkungan dan/atau Rekomendasi Izin PPLH yang diterbitkan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL)	2	62.500.000	
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Lampung Tengah	Jumlah Orang yang mengikuti peningkatan kapasitas PPLH	2	10.000.000	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Lampung Tengah	Jumlah Orang yang mengikuti peningkatan kapasitas PPLH	2	40.000.000	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Tengah	Jumlah Usaha yang diawasi	50	20.000.000	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Tengah	Jumlah Usaha yang diawasi	30	21.000.000	
7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				40.500.000	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				53.000.000	
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				40.500.000	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				53.000.000	
	Koordinasi,Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Lampung Tengah	Jumlah Kelompok	1	40.500.000	Koordinasi,Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Lampung Tengah	Jumlah Kelompok	1	53.000.000	

8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				27.000.000	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				201.000.000	
	Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				27.000.000	Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				201.000.000	
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Lampung Tengah	Jumlah Peserta	100	27.000.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Lampung Tengah	Jumlah Peserta	400	201.000.000	
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				45.000.000	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				142.000.000	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				45.000.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				142.000.000	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lampung Tengah	Terlaksananya Penilaian dan Pemberian Penghargaan PPLH	9	45.000.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lampung Tengah	Terlaksananya Penilaian dan Pemberian Penghargaan PPLH	9	142.000.000	
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				14.000.000	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				43.000.000	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				14.000.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				43.000.000	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Lampung Tengah	Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan LH dari Masyarakat	4	14.000.000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Lampung Tengah	Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan LH dari Masyarakat	2	43.000.000	
11	Program Pengelolaan Persampahan				130.000.000	Program Pengelolaan Persampahan				1.020.709.500	
	Pengelolaan Sampah				130.000.000	Pengelolaan Sampah				1.020.709.500	
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Lampung Tengah	Volume Sampah yang diangkut dan ditangani dengan cara 5P (ton)	2	100.000.000	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Lampung Tengah	Volume Sampah yang diangkut dan ditangani dengan cara 5P (ton)	16000	867.770.000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Lampung Tengah	Penyediaan Prasarana dan Sarana Operasional Pengelolaan Persampahan (unit)	4	30.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Lampung Tengah	Penyediaan Prasarana dan Sarana Operasional Pengelolaan Persampahan (unit)	11	136.650.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Lampung Tengah	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (unit)	0	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Lampung Tengah	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (unit)	1	16.289.500	
TOTAL					10.292.662.070	TOTAL					11.202.662.020

E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Proses pengajuan usulan kegiatan DLH dilakukan melalui proses Partisipatif. Usulan Kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan.

Dalam rangka mengantisipasi dan menjaring aspirasi terhadap kegiatan usulan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup menunggu dan melihat hasil Musrenbang tingkat kecamatan. Namun untuk Tahun 2024 belum ada usulan kegiatan yang berkorelasi langsung dengan bidang lingkungan hidup, walaupun ada dari beberapa usulan tersebut secara spesifik masuk pada bidang lain seperti Dinas Pekerjaan Umum.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DLH LAMPUNG TENGAH

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Visi Pembangunan Nasional yaitu : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Tujuan Pembangunan Nasional Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 dalam menunjang Visi Pembangunan Nasional yaitu : **Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat**” dalam mendukung **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu **Keberlanjutan** dan **Kesejahteraan**, dengan makna sebagai berikut: (1) **Keberlanjutan** berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan (2) **Kesejahteraan** berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara. Harapan yang ingin dicapai sekaligus ingin diubah dengan Visi KLHK untuk lima tahun yang akan datang, tercermin pada 4 pilar dari perwujudan sasaran strategis KLHK sebagai berikut: (1) **Pilar Lingkungan** yakni kualitas lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim, (2) **Pilar Ekonomi** yakni optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya

tampung lingkungan, (3) **Pilar Sosial**, yakni terjaminya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dan (4) **Pilar Tata Kelola** yakni tata kelola dan inovasi pembangunan yang semakin berdaya saing.

Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (outcome/impact) dari satu program atau gabungan program yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing sasaran strategis KLHK 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Target kinerja KLHK Tahun 2020-2024 berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator
Kinerja Utama (IKU)

SS-1: Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim								
No	Indikator Kinerja	satuan	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	66,56	68,71	68,96	69,22	69,48	69,74
2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah	%	-	16,28	16,75	17,22	17,38	17,54
3	Penurunan Laju Deforestasi	Juta ha	0,44	0,44	0,43	0,38	0,33	0,31
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	50,9	61	63	65	67	70
5	Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya	Ribu ha	207	90	220	230	230	230
6	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Values)	Juta ha	28	15,60	13,80	10,30	12,10	18,20

Sumber : Renstra KLHK RI 2020-2024

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DLH LAMPUNG TENGAH

➤ TUJUAN DLH LAMPUNG TENGAH

Adapun Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah 5 (lima) tahun kedepan, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 berikut :

Memperhatikan Visi di RPJMD Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026 yaitu

" Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya"

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 5 (lima) misi. Pada salah satu misi yakni Misi kedua yaitu **Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa (Percepatan Infrastruktur)**. Misi tersebut mempunyai arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang dijalankan oleh DLH Kabupaten Lampung Tengah. Tujuan dari misi tersebut adalah **Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, berdaya saing dan berwawasan lingkungan**. Adapun sasaran pada tujuan tersebut yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup terutama adalah pada sasaran kelima yakni Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup Maka dalam mengimplementasikan Visi dan Misi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampung Tengah memiliki peran strategis dalam rencana aksi pengelolaan lingkungan yang bertujuan :

"MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP"

Indikator Kinerja Utama dari tujuan DLH Kabupaten Lampung Tengah adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan satuan adalah poin. Target dari tujuan DLH Kabupaten

Lampung Tengah yaitu meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026 berada pada rentang 61.83-64,74 seperti yang ditunjukan pada tabel 3.2 berikut ini

Tabel 3.2
TUJUAN STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2021-2026

No	Tujuan	Indikator	Formulasi/Penjelasan	Satuan	Target	Target	OPD PENANGGUNG JAWAB
					Awal	Akhir	
					2021	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH Kabupaten/Kota dihitung dengan menggunakan proporsi sbb : $IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$ (Sumber Surat Edaran Dirjen PPKL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020))	Poin	61,83	64,74	DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tengah 2021-2026

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah memiliki makna bahwa Dinas LH Kabupaten Lampung Tengah berkeinginan untuk mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas tinggi bagi seluruh warga Kota Lampung Tengah, untuk mencapai derajat kesehatan dan kesejahteraan tinggi, serta menyiapkan dukungan lingkungan hidup bagi keberlanjutan pembangunan generasi yang akan datang.

➤ **SASARAN DLH LAMPUNG TENGAH**

Untuk mendukung tercapainya Tujuan DLH Kabupaten Lampung Tengah maka diperlukan sasaran sebagai berikut yaitu :

1. Meningkatnya kualitas air

Indikator kinerja sasaran adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Target sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024 adalah meningkatkan IKA berada pada 58,64 poin

2. Meningkatnya kualitas udara

Indikator kinerja sasaran adalah Indeks Kualitas Udara (IKU), Target sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024 adalah 84,28 poin

3. Meningkatnya kualitas Tutupan Lahan (Hutan)

Indikator kinerja sasaran adalah Indeks Tutupan Hutan (ITH), Target sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024 adalah 33,78 poin

4. Meningkatnya pelayanan penanganan sampah

Indikator kinerja sasaran adalah Persentase penanganan sampah yang dapat diangkut (%). Target sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024 adalah meningkatkan Persentase berada pada rentang 23%

Tabel 3.3
SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Formulasi/Penjelasan	Satuan	Target						OPD PENANGGUNG JAWAB
					2021	2022	2024	2024	2025	2026	
1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air (poin)	$IKA = \frac{(CI/CI) + 2M + (CI/CI) + 2R}{2}$	Poin	58,34	58,44	58,54	58,64	58,74	58,84	DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
	2. Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (poin)	$IKD = 100 - ((50/0,9) \times (leu - 0,1))$	poin	83,98	84,08	84,18	84,28	84,38	84,48	DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
	3. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Lingkungan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (poin)	$LT = LTH / LWK$ $ITH = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times (50/54,3))$	poin	26,86	29,17	31,47	33,78	36,17	38,47	DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
	4. Meningkatnya pelayanan penanganan sampah	Persentase penanganan sampah yang dapat ditangani (%).	$\frac{\text{volume sampah yang ditangani}}{\text{volume total sampah}} \times 100 \%$	%	20	21	22	23	24	25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tengah 2021-2026

C. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa kegiatan yang terkandung didalamnya guna mencapai tujuan tertentu.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 terncantum pada Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut :

TABEL 3.4 (T-C.33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024						Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana(dalam Ribu Rupiah)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SKPD
						APBD KAB	APBD PROV	APBN/HIBAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Junlah Dokumen		1	370.000.000	370.000			1	170.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Junlah Dokumen		1	70.000.000	70.000			1	70.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.02.2.01.01	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Junlah Dokumen	Lampung Tengah	1	70.000.000	70.000			1	70.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.02.2.01	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Junlah Dokumen		1	300.000.000	300.000			1	100.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.02.2.01.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Junlah Dokumen	Lampung Tengah	1	300.000.000	300.000			1	100.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.3.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik sampling Kualitas air sampling yang memenuhi standar baku mutu		73	240.000.000	560.000			74	240.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.3.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kategori Kualitas Air yang dipantau		2	225.000.000	535.000			2	225.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.3.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Titik Pantau DAS (titikK)	Lampung Tengah	15	150.000.000	35.000			15	150.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.3.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah uji sample kualitas air Limbah atau	Lampung Tengah	35	500.000.000	500.000			40	500.000.000	UPT Laboratorium

		Sungai yang dapat dianalisis (uji)									LH
2.11.3.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten(Kegiatan)		1	15.000.000	25.000			1	15.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.3.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi (orang)	Lampung Tengah	75	25.000.000	25.000			80	25.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.3.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu		83	50.000.000	50.000			84	50.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.3.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Titik Pantau Kualitas Udara ambien (Jenis)		4	50.000.000	50.000			4	50.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.3.2.01.02	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara ambien (titik)	Lampung Tengah	12	50.000.000	50.000			12	50.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang Terpelihara		100%	550.000.000	550.000			100%	550.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Keanekaragaman Hayati yang terpelihara		22	550.000.000	550.000			22	550.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen yang dibuat	Lampung Tengah	1	50.000.000	50.000			1	50.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang dikelola	Lampung Tengah	22	500.000.000	500.000			22	500.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Total Perusahaan yang memiliki Perizinan B3 dengan Total Perusahaan		25%	50.000.000	50.000			30%	100.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Dokumen		1	50.000.000	50.000			1	100.000.000	DLH Lampung Tengah

2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Perizinan dan Instalasi LB 3 Perusahaan yang diverifikasi (Perusahaan)	Lampung Tengah	35	50.000.000	50.000			40	60.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Total usaha yang taat terhadap izin lingkungan dengan total usaha yang dibina dan diawasi		70%	130.000.000	130.000			80%	170.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha atau kegiatan yang memenuhi ketaatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan		35	130.000.000	130.000			40	170.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Izin Lingkungan/Izin PPLH yang difasilitasi	Lampung Tengah	2	50.000.000	50.000			2	60.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLH yang mengikuti Kegiatan Pengembangan Kapasitas	Lampung Tengah	2	30.000.000	30.000			2	50.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	Lampung Tengah	50	50.000.000	50.000			50	60.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah MHA		1	60.000.000	60.000			1	60.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kegiatan		1	60.000.000	60.000			1	60.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.07.2.01.01	Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait	Jumlah kelompok	Lampung Tengah	1	60.000.000	60.000			1	60.000.000	DLH Lampung Tengah

	dengan PPLH										
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan ingkungan hidup untuk masyarakat		100	150.000.000	150.000			100	150.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan		2	150.000.000	150.000			3	150.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Peserta	Lampung Tengah	400	150.000.000	150.000			450	150.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Nominasi penerima penghargaan LH Lampung Tengah yang didaftarkan ke tingkat provinsi atau nasional		2	110.000.000	110.000			2	150.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Penghargaan LH		3	110.000.000	110.000			3	150.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan LH (Adiwiyata, Kalpataru, dan Perusahaan Terbaik dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH)	Lampung Tengah	6	110.000.000	110.000			6	150.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Total Pengaduan yang ditangani dengan Total Pengaduan yang masuk		50%	50.000.000	50.000			50%	50.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan yang dapat diselesaikan		2	50.000.000	50.000			2	50.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan LH dari masyarakat	Lampung Tengah	4	50.000.000	50.000			4	50.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Volume Sampah yang diolah/Volume timbunan sampah		0,33	1.145.000.000	1.750.000			0,33	1.145.000.000	DLH Lampung Tengah

		(poin)									
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Volume Sampah yang diolah (ton)		5200	1.145.000.000	1.750.000			5300	1.145.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Volume Sampah yang diangkut dan ditangani dengan cara 5P (ton)	Lampung Tengah	16000	1.000.000.000	1.000.000			16000	1.000.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Operasional Pengelolaan Persampahan (unit)	Lampung Tengah	12	150.000.000	150.000			12	150.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan di TPS dan TPA (unit)	Lampung Tengah	1	600.000.000	600.000			1	600.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realiasi Anggaran Penunjang urusan pemerintahan daerah di OPD (%)		88	9.564.000.000	9.564.000			92	10.184.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Predikat Akuntabilitas Kinerja OPD(%)		64	50.000.000	50.000			66	50.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Lampung Tengah	4	30.000.000	30.000			4	30.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	Lampung Tengah	2	20.000.000	20.000			2	20.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Administrasi Keuangan OPD(%)		86%	7.500.000.000	7.500.000			88%	8.000.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Lampung Tengah	41	4.250.000.000	4.250.000			42	4.500.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN dan Non ASN	Lampung Tengah	160	3.250.000.000	3.250.000			160	3.500.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti (jenis)		2	20.000.000	20.000			2	20.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Aparatur DLH	Lampung	2	20.000.000	20.000			2	20.000.000	DLH Lampung

	Berdasarkan Tugas dan Fungsi	yang mendapatkan sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Formal (Orang)	Tengah								Tengah
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan administrasi umum		81%	314.000.000	314.000			82%	314.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen listrik/penerangan yang diadakan(jenis)	Lampung Tengah	10	5.000.000	5.000			10	5.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor (jenis)	Lampung Tengah	50	50.000.000	50.000			50	50.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah ketersediaan kebutuhan peralatan rumah tangga (Jenis)	Lampung Tengah	18	6.000.000	6.000			18	6.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan kebutuhan bahan logistik kantor (jenis)	Lampung Tengah	3	15.000.000	15.000			3	15.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan (item)	Lampung Tengah	11	13.000.000	13.000			11	13.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	Lampung Tengah	38	30.000.000	30.000			38	30.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan dan minum peserta rapat/tamu (bulan)	Lampung Tengah	12	35.000.000	35.000			12	35.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)	Lampung Tengah	100	160.000.000	160.000			100	160.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Total Pengadaan (unit)		22	1.100.000.000	1.100.000			22	1.100.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan (Truk Arm Roll 1 Unit, Motor Roda 2 1 unit dan Bentor Roda Tiga 2 unit)	Lampung Tengah	2	1.000.000.000	1.000.000			2	1.000.000.000	DLH Lampung Tengah

2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeuler yang diadakan(unit)	Lampung Tengah	10	50.000.000	50.000			10	50.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yg diadakan (unit)	Lampung Tengah	10	50.000.000	50.000			10	50.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang dipenuhi		3	80.000.000	80.000			3	100.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembayaran (bulan)	Lampung Tengah	12	80.000.000	80.000			12	100.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi(%)		70%	500.000.000	500.000			75%	600.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraaan Dinas/Operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin (unit)	Lampung Tengah	11	400.000.000	400.000			11	500.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis peralatan kantor yg dilakukan pemeliharaan(item)	Lampung Tengah	6	50.000.000	50.000			6	50.000.000	DLH Lampung Tengah
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yg dilakukan pemeliharaan unit	Lampung Tengah	2	50.000.000	50.000			2	50.000.000	DLH Lampung Tengah
Total					12.519.000.000					13.019.000.000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DLH LAMPUNG TENGAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 definisi dari program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dengan pengertian tersebut dan setelah menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah 2021-2026 maka untuk mendukung hal tersebut di atas DLH Kabupaten Lampung Tengah menetapkan rencana dari 11 program, 19 kegiatan, dan 37 sub kegiatan di Tahun 2024 sebagai berikut :

1) PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini dilakukan untuk melaksanakan semua Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Lampung Tengah yang telah disusun pada tahun 2019. RPPLH tersebut masih dalam tahap proses Raperda di DPRD Lampung Tengah. Sesuai Renstra DLH 2021-2026 program ini akan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan RPPLH Lampung Tengah yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas LH di Lampung Tengah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target program yang dimaksud adalah :

- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Kabupaten/Kota
 - i. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

ii. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

Sub Kegiatan ini Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota berupa penyusunan IKPLD Kab Lampung Tengah Tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada bulan Februari s/d Juni 2024.

2) PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air. Hasil yang diharapkan akan dicapai dari Program ini adalah meningkatnya Kualitas Air dari Sungai yang ada di Lampung Tengah agar mendapatkan status indeks pencemaran "cemerlang".

Program ini juga mendukung operasional Monitoring Alat Kualitas Air secara Online (ONLIMO) yang telah diadakan dari Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2022 Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia di Anak Tuha.

Program ini juga dilaksanakan sebagai upaya untuk mengendalikan kualitas udara perkotaan Kota Bandar Jaya dan Gunung Sugih sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Harapan dari terlaksananya program ini adalah terjadinya peningkatan pada Indeks Kualitas Udara.

Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas air dan kualitas udara pada tahun 2021-2026 adalah :

- a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

- i. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.
 - ii. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
 - iii. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
- b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- i. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.

Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2019 Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah. UPTD Laboratorium Lingkungan melaksanakan tugas sebagai Laboratorium uji kualitas lingkungan,

3) PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memperbaiki fungsi hidrologis tanah atau pun lahan terbuka dalam rangka melindungi kualitas tutupan lahan. Tujuan akhir dari program ini adalah mencapai peningkatan indeks kualitas tutupan lahan. Kegiatan dan sub kegiatan untuk program selama 2021-2026 ini adalah

- a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - i. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

ii. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

**4) PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**

Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran air, udara maupun tanah yang diakibatkan oleh limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) baik pada saat penyimpanan. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan Pengendalian B3 dan LB3 di Lampung Tengah secara administrasi dan teknis.

- a. Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - i. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3.

**5) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN
DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**

Program ini dilaksanakan untuk memfasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH, mengembangkan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan mengawasi Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini adalah sbb :

- a. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - ii. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
 - iii. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**6) PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA),
KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**

Program ini dilaksanakan untuk mendata dan mengakui Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH di Lampung Tengah.

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini adalah sbb :

- a) Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
 - i. Sub Kegiatan Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

**7) PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk masyarakat di Lampung Tengah mengenai regulasi, aturan dan informasi mengenai Lingkungan Hidup. Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini adalah sbb:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

8) PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Program ini dilaksanakan untuk mengapresiasi kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam rangka di Lampung Tengah dengan memberikan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah. Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini adalah sbb :

- a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- i. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

9) PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini dilaksanakan untuk menerima, mengelola dan menangani laporan pengaduan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten Lampung Tengah.

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini adalah sbb:

- a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - i. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

10) PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk Meningkatnya pelayanan penanganan sampah, sekaligus upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) melalui pemanfaatan sampah sejak dari sumber. Tujuan Akhir yang ingin dicapai adalah menciptakan lingkungan yang *zero waste* sehingga lingkungan hidup pun dapat meningkat dengan berkelanjutan. Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini adalah sbb:

- a. Pengelolaan Sampah
 - i. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - ii. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

- iii. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

PROGRAM PENUNJANG TAHUN 2021-2026

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan dalam memenuhi tujuan dan sasaran strategis demi tercapainya visi dan misi bupati, maka diperlukan dukungan manajerial seperti penyediaan sarana prasarana, pengelolaan pegawai dan penyediaan fasilitas pendukung lainnya. Program dan kegiatan yang disediakan untuk layanan administrasi perkantoran terdiri dari :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas LH selama 2021-2026 seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Pelaporan Kinerja setiap tahunnya.
 - i. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan untuk pembayaran gaji asn dan tks, pembayaran honor administrasi perkantoran di Dinas LH. Selain itu kegiatan ini adalah untuk penyusunan laporan realisasi anggaran, neraca dan anggaran kas setiap tahunnya.

Sub kegiatan ini terdiri dari :
 - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ii. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun database Administrasi Kepegawaian dan memberikan kesempatan untuk ASN/TKS Dinas LH mengikuti pendidikan/Pelatihan berdasarkan bidang kerja atau keahlian yang diminati.

Sub kegiatan ini terdiri dari :

- i. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyelenggarakan urusan administrasi umum perkantoran dan menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap saat.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah :

- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ii. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- iii. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- iv. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- v. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- vi. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- vii. Fasilitas Kunjungan Tamu
- viii. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi aparatur, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah :

- i. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ii. Pengadaan Mebel

iii. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di kantor setiap tahunnya.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah :

i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan operasional dan pemeliharaan semua sarana dan prasarana di kantor agar berfungsi dan layak dipakai.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah :

i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

ii. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sasaran, indikator, target dan pendanaan setiap program, Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan DLH Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 tercantum pada Tabel 4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah sbb:

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Junlah Dokumen	1	370.000.000
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Junlah Dokumen	1	70.000.000
2.11.02.2.01.01	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Junlah Dokumen	1	70.000.000
2.11.02.2.01	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Junlah Dokumen	1	300.000.000
2.11.02.2.01.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	Junlah Dokumen	1	300.000.000
2.11.3.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik sampling Kualitas air sampling yang memenuhi standar baku mutu	73	240.000.000
2.11.3.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kategori Kualitas Air yang dipantau	2	225.000.000
2.11.3.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Titik Pantau DAS (titik)	15	150.000.000
2.11.3.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah uji sample kualitas air Limbah atau Sungai yang dapat dianalisis (uji)	35	500.000.000
2.11.3.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten(Kegiatan)	1	15.000.000
2.11.3.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi (orang)	75	25.000.000
2.11.3.	PROGRAM PENGENDALIAN	Persentase titik	83	

	PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu		50.000.000
2.11.3.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Titik Pantau Kualitas Udara ambien (Jenis)	4	50.000.000
2.11.3.2.01.02	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara ambien (titik)	12	50.000.000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang Terpelihara	100%	550.000.000
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Keanekaragaman Hayati yang terpelihara	22	550.000.000
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen yang dibuat	1	50.000.000
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang dikelola	22	500.000.000
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Total Perusahaan yang memiliki Perizinan B3 dengan Total Perusahaan	25%	100.000.000
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Dokumen	1	100.000.000
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Perizinan dan Instalasi LB 3 Perusahaan yang diverifikasi (Perusahaan)	35	50.000.000
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Total usaha yang taat terhadap izin lingkungan dengan total usaha yang dibina dan diawasi	70%	130.000.000
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha atau kegiatan yang memenuhi ketaatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan	35	130.000.000
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Izin Lingkungan/Izin PPLH yang difasilitasi	2	50.000.000
2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLH yang mengikuti Kegiatan Pengembangan	2	30.000.000

		Kapasitas		
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	50	50.000.000
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah MHA	1	60.000.000
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kegiatan	1	60.000.000
2.11.07.2.01.01	Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok	1	60.000.000
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan ingkungan hidup untuk masyarakat	100	150.000.000
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan	2	150.000.000
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Peserta	400	150.000.000
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Nominasi penerima penghargaan LH Lampung Tengah yang didaftarkan ke tingkat provinsi atau nasional	2	110.000.000
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Penghargaan LH	3	110.000.000
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Jumlah Penghargaan LH (Adiwiyata, Kalpataru, dan Perusahaan Terbaik dalam Perlindungan	6	110.000.000

	Hidup	dan Pengelolaan LH)		
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Total Pengaduan yang ditangani dengan Total Pengaduan yang masuk	50%	50.000.000
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan yang dapat diselesaikan	2	50.000.000
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan LH dari masyarakat	4	50.000.000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Volume Sampah yang diolah/Volume timbunan sampah (poin)	0,33	1.145.000.000
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Volume Sampah yang diolah (ton)	5200	1.145.000.000
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Volume Sampah yang diangkut dan ditangani dengan cara 5P (ton)	16000	1.000.000.000
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Operasional Pengelolaan Persampahan (unit)	12	150.000.000
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan di TPS dan TPA (unit)	1	600.000.000
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realiasi Anggaran Penunjang urusan pemerintahan daerah di OPD (%)	88	9.564.000.000
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Predikat Akuntabilitas Kinerja OPD(%)	64	50.000.000
2.11.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	4	30.000.000
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	2	20.000.000
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Administrasi	86%	7.500.000.000

		Keuangan OPD(%)		
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	41	4.250.000.000
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN dan Non ASN	160	3.250.000.000
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti (jenis)	2	20.000.000
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur DLH yang mendapatkan sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Formal (Orang)	2	20.000.000
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan administrasi umum	81%	314.000.000
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen listrik/penerangan yang diadakan(jenis)	10	5.000.000
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor (jenis)	50	50.000.000
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah ketersediaan kebutuhan peralatan rumah tangga (Jenis)	18	6.000.000
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan kebutuhan bahan logistik kantor (jenis)	3	15.000.000
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan (item)	11	13.000.000
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	38	30.000.000
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan dan minum peserta rapat/tamu (bulan)	12	35.000.000
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)	100	160.000.000

2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Total Pengadaan (unit)	22	1.100.000.000
2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan (Truk Arm Roll 1 Unit, Motor Roda 2 1 unit dan Bentor Roda Tiga 2 unit)	2	1.000.000.000
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeuler yang diadakan(unit)	10	50.000.000
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yg diadakan (unit)	10	50.000.000
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	Jumlah Jasa yang dipenuhi	3	80.000.000
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembayaran (bulan)	12	80.000.000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi(%)	70%	500.000.000
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraaan Dinas/Operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin (unit)	11	400.000.000
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis peralatan kantor yg dilakukan pemeliharaanaan(item)	6	50.000.000
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yg dilakukan pemeliharaan unit	2	50.000.000
Total				12.519.000.000

BAB V
PENUTUP

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024, sangat tergantung kepada kondisi sosial budaya, ekonomi dan politik, serta ditunjang oleh partisipasi berbagai komponen masyarakat dan sikap mental penyelenggara di daerah, khususnya jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.

Renja merupakan penjabaran dari RPJMD, RENSTRA, kondisi lingkungan hidup, pengalaman empirik, dan dilandasi oleh landasan hukum yang jelas, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua *stakeholder*. Renstra diharapkan menjadi dokumen perencanaan taktis-strategis yang dijadikan dasar perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan tahunan dan penyusunan APBD di bidang lingkungan hidup.

Semoga RENJA Dinas Lingkungan Hidup ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

Gunung Sugih, 3 Agustus 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Lampung Tengah



RONY WITONO, S.T., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730815 199803 1 007

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
3. Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 2020-2024;
4. Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 2022;
5. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2019-2024;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung 2021-2026;
7. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung 2021-2026;
8. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung 2022.